

MENANTI JEMBATAN BAILEY

Warga menggunakan kabel baja untuk menyeberangi Sungai Peusangan pascaputusnya jembatan Teupin Mane yang menghubungkan Kabupaten Bireuen dengan dataran tinggi Gayo di Juli, Bireuen, Aceh, Minggu (7/12/2025). Warga mendesain kabel baja untuk dijadikan sarana penyeberangan guna memobilisasi warga dan barang bantuan sejak putusnya jembatan pada (26/11/2025) akibat bencana banjir bandang. Diketahui saat ini, jembatan bailey di Teupin Mane tersebut masih dalam proses pembangunan. Berita terkait baca hal.2. (ist.antara)

Hasil Forum Seseuph dan Mustasyar NU di Pesantren Tebuireng atas Dinamika Organisasi di PBNU

1. Forum berpandangan bahwa proses pemakzulan Ketua Umum tidak sesuai dengan aturan organisasi sebagaimana ketentuan AD/ART.

2. Meski demikian, forum juga melihat adanya informasi kuat terjadinya pelanggaran atau kekeliruan serius dalam pengambilan keputusan oleh Ketua Umum, yang perlu diklarifikasi melalui mekanisme organisasi secara menyeluruh.

3. Forum merekomendasikan agar Rapat Pleno untuk menetapkan PJ tidak diselenggarakan sebelum seluruh prosedur dan musyawarah diselesaikan sesuai ketentuan organisasi.

4. Forum Seseuph mengajak seluruh pihak untuk menahan diri, menjaga ketertiban organisasi, dan menghindari langkah yang berpotensi memperbesar ketegangan. Forum menegaskan bahwa persoalan ini hendaknya diselesaikan melalui mekanisme internal NU, tanpa melibatkan institusi atau proses eksternal, demi menjaga kewibawaan jam'iyah dan memelihara NU sebagai aset besar bangsa.

BENDERANG PERPECAHAN NU GEGARA TAMBANG

Meski sudah menyeruak sejak awal kisruh, kini dugaan tambang sebagai pemicu perpecahan di tubuh Nahdlatul Ulama (NU) makin benderang. Bak menegaskan akar konflik, Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siroj meminta agar konsesi tambang dikembalikan kepada pemerintah. Alasannya, demi menghindari mudarat yang semakin nyata bagi umat. Diketahui, PBNU memperoleh izin tambang batu bara di Kalimantan Timur (Kaltim). Tepatnya di area eks-lahan milik PT Kaltim Prima Coal (KPC), dengan luas sekitar 26.000 hektar. Rencananya tambang itu akan dikelola melalui anak usaha BUMN yang dibentuk khusus, yaitu PT Berkah Usaha Muamalah Nusantara (BUMN). Memasnya konflik ini bermula saat Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar menegaskan Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) tidak lagi menjabat sebagai ketua umum PBNU sejak 26 November 2025 pukul 00.45 WIB. Namun, Gus Yahya menolak pemberhentian tersebut. Menurutnya, pemberhentian ketua umum PBNU hanya bisa dilakukan melalui muktamar. Terbaru kedua kubu saling menyerukan jadwal rapat. Rais Syuriyah PBNU M.Nuh menegaskan agenda rapat pleno terkait penetapan Penjabat Ketua Umum PBNU tetap digelar pada 9 Desember mendatang. Sementara, Gus Yahya akan menggelar rapat pleno tandingan pada 11 Desember 2025. Seruan islah kiai-kiai sepuh tampaknya tak akan semudah membalikkan telapak tangan.

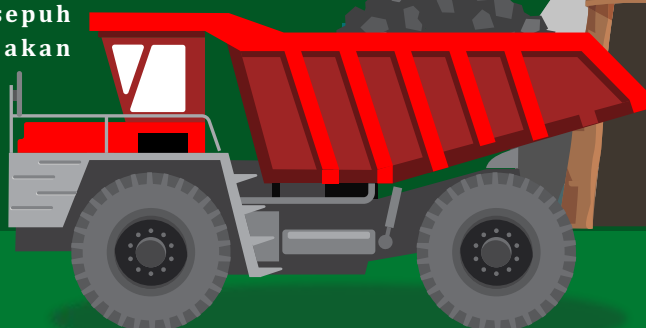
TENTANG TAMBANG PBNU

Dasar Hukum:
Pemerintah mengizinkan ormas mengelola WIUPK.

Lahan Konsesi:
NU mendapat 26.000 hektar eks-KPC di Kaltim.

Status Terkini:
PBNU cari investor, KH Said Aqil ingin izin dikembalikan.

BACA HAL 11...



JANJI-JANJI PRABOWO UNTUK ACEH USAI BENCANA

Presiden Prabowo Subianto bertolak menuju Provinsi Aceh, Minggu (7/12/2025). Untuk kedua kalinya, Prabowo meninjau langsung penanganan bencana yang melanda sejumlah wilayah di Tanah Rencong. Prabowo memastikan pemerintah akan menghapus semua utang Kredit Usaha Rakyat (KUR) seluruh petani Aceh yang terdampak banjir dan longsor. Pemerintah juga akan segera merehabilitasi sawah yang rusak disapu banjir.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan akan membantu para petani terdampak bencana banjir dan longsor di Aceh dan Sumatera. Ada dua langkah yang akan dilakukan, yakni rehabilitasi sawah yang rusak dan penghapusan utang KUR (Kredit Usaha Rakyat) para petani.

Hal ini disampaikan Prabowo saat meninjau kondisi Jembatan Bailey Teupin Mane, Kabupaten Bireuen, Aceh, Minggu (7/12/2025).

"Sawah-sawah yang rusak akan kita rehabilitasi. Dan sudah dilaporkan ke saya, petani-petani enggak usah khawatir. Kalau sawahnya rusak, kita akan bantu perbaiki," ujar Prabowo.

Prabowo juga berjanji akan



Presiden Prabowo Subianto (ketiga kiri) didampingi Gubernur Aceh Muzakir Manaf (tengah) mencicipi makanan yang dimasak di dapur umum posko pengungsian bencana alam Desa Belee Panah, Bireuen, Aceh, Minggu (7/12/2025). (istiantara)

mengirim pangan ke sini karena karena stok cadangan beras pemerintah masih banyak. Selain pemulihan lahan, dia juga memastikan beban utang petani akan dihapus, mengingat situasi bencana alam yang bersifat memaksa.

"Kemudian utang-utang KUR, karena ini keadaan alam ya, akan

dihapus. Petani enggak usah khawatir. Karena ini bukan kelalaian tapi keadaan memaksa, force majeure," katanya.

Menurutnya seluruh instansi bekerja bersama dalam penanganan bencana ini. "Saya lihat kondisi, kerja semua instansi baik, bahu-membahu sama rakyat, sama Pemerintah

Daerah. Polisi, Tentara semua bekerja. KSAD (Kepala Staf Angkatan Darat), kerahkan semua ya," terangnya.

Target Perbaikan Jembatan 2 Minggu

Presiden Prabowo Subianto menargetkan seluruh jembatan yang rusak akibat bencana di Aceh dapat selesai diperbaiki dalam waktu satu hingga dua minggu.

Prabowo mengatakan progres perbaikan di lokasi berjalan intensif. "Ini kita lihat salah satu Jembatan Bailey, mereka kerja terus, diharapkan satu minggu sudah bisa buka. Dan dari sini bisa terus untuk membuka tiga jembatan lagi ya. Yang menuju Bener Meriah dan Takengon keatas," ujarnya.

Menurut Prabowo, akses dari berbagai titik terus diupayakan agar wilayah terdampak dapat segera terhubung kembali.

"Ada jalan lagi dari Banda Aceh. Itu mungkin lebih ringan, karena hanya tiga lokasi ya. Tadi kita lihat semua usaha dikerahkan, nanti semua jembatan akan diperbaiki," kata Prabowo.

"Mudah-mudahan satu, dua minggu ya. Karena masalahnya adalah tembus ini, baru kita bisa kerja yang lain," lanjutnya.

Selain jembatan, sejumlah bendungan juga dilaporkan rusak. "Jadi tadi dilaporkan bendungan-bendungan juga banyak yang jebol. Nanti PU (Pekerjaan Umum) ya akan segera memperbaiki," ucap Prabowo.

Untuk mempercepat penanganan, Prabowo menunjuk Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak sebagai pemimpin satuan tugas (Satgas).

"Saya tunjuk nanti KSAD sebagai Satgas percepatan perbaikan jembatan, untuk membantu PU dan Pemerintah Daerah," jelas Prabowo.

"Karena beliau punya banyak pasukan Zeni, pasukan konstruksi, pasukan pembangunan, pasukan teritorial. Jadi bisa segera membantu," tandasnya.

Ketua Komisi V DPR, Lasarus, menyebut mengizinkan Kementerian PU, Kementerian Perhubungan, hingga Basarnas untuk menggunakan anggaran mereka tanpa persetujuan Komisi V asal digunakan untuk penanggulangan bencana di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh.

"Ini kami juga dari Komisi V sudah membebaskan Kementerian PU, Kementerian Perhubungan, kemudian Basarnas untuk menggunakan dana di internal untuk melakukan perputaran antar direktorat jenderal atau antar deputi tanpa persetujuan DPR," ucap Lasarus di Lembang, Jawa Barat. (gus,kum,ant)

Data Terbaru Bencana Sumatera

Jumlah korban meninggal
940 Orang

Jumlah korban hilang
276 Orang

Jumlah korban terluka
5.000 Orang

Jumlah rumah rusak
147 ribu unit

Jumlah kabupaten/kota terdampak
52 Lokasi



BADAN Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memperbarui data korban meninggal bencana di Sumatera. Data terbaru saat ini tercatat ada 940 orang meninggal dunia.

Data tersebut diketahui berdasarkan situs dashboard

Korban Meninggal Bencana Sumatera Jadi 940 Orang, 276 Hilang

penanganan bencana darurat banjir dan longsor di Aceh, Sumut, Sumbar, Minggu (7/12/2025), pukul 17.00 WIB.

Ada 276 orang saat ini dilaporkan masih hilang. Sementara lima ribu orang mengalami luka-luka di tiga provinsi.

BNPB mencatat korban tewas paling banyak terdapat di wilayah Agam, Sumatera Barat, dengan total 172 jiwa. Aceh Utara juga menjadi wilayah dengan jumlah pengungsi terbanyak sebesar 304 ribu orang.

Jumlah korban tewas, hilang, luka serta yang menjadi pengungsi dapat bertambah seiring proses evakuasi dan pembersihan sisa material banjir bandang serta longsor dilakukan. Hingga kini, sejumlah ruas jalan di Aceh, Sumut, dan Sumbar masih terputus. Aliran listrik dan komunikasi di daerah terdampak bencana juga belum sepenuhnya normal.

Presiden Prabowo Subianto meminta kepada Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin untuk

mengirimkan dokter internship (magang) untuk ikut membantu korban bencana di Sumatera dan Aceh.

Mulanya Budi menyampaikan bahwa di Aceh terjadi kekurangan dokter yang cukup banyak karena mereka juga menjadi korban bencana.

"Kita kekurangan dokter karena dokter di sana jadi korban juga," kata Budi. Budi pun meminta tolong kepada Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin untuk membantu menurunkan sekitar 300 dokter dari TNI dan Polri selama 3 bulan untuk membantu.

"Jadi saya minta tolong juga Pak Menhan kalau boleh saya butuh sekitar 300 dokter 3 bulan ke depan untuk ngisi sampai mereka jadi, saya atasi sebagian tapi kalau boleh TNI polri kan lebih gampang mobilisasinya," ujarnya.

Pada kesempatan itu, Prabowo pun bertanya apakah dokter koas sudah boleh diturunkan atau tidak untuk membantu korban. (wid,ist,ant/dya)

SETELAH PKB DAN GOLKAR, KINI PDIP AKAH KAJI USULAN KEPALA DAERAH DIPILIH DPRD

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) akan mengkaji usulan Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar Bahliil Lahadalia soal kepala daerah yang dapat dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Ditegaskan kajian harus dilakukan agar sistem pemilihan dapat bermanfaat bagi masyarakat.

Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan partainya akan mengkaji usulan kepala daerah dipilih DPRD dengan mempertimbangkan aspirasi rakyat dan aspek aspek konstitusional.

"PDI Perjuangan terus melakukan kajian-kajian. Pada prinsipnya, sistem selalu mengandung plus-minusnya. Kita mencari mana yang membawa manfaat bagi rakyat," kata Hasto menjawab pertanyaan wartawan di Bandung, Jawa Barat, Minggu (7/12/2025).

Sebagai suatu pandangan politik, Hasto menyebut PDIP mesti mengkaji terlebih dahulu ihwal pemilihan kepala daerah melalui DPRD atau tetap dipilih secara langsung. Hal ini agar sistem pemilihan dapat bermanfaat bagi penguatan demokrasi dan memperkuat legitimasi kepemimpinan.

"Tapi yang terpenting adalah pemimpin kepala-kepala daerah memang mampu menghasilkan keputusan politik di dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi, mengatasi kemiskinan, kesenjangan, dan berbagai bentuk ketidakadilan," tuturnya.

Terlepas dari sistem pilihannya, ia memandang bahwa yang terpenting adalah para kepala daerah



(Ilustrasi) Petugas melipat surat suara jelang Pemilihan Kepala Daerah 2024 lalu. (Dok)

mampu menghasilkan keputusan politik dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi, mengatasi kemiskinan, serta berbagai bentuk kesenjangan dan ketidakadilan.

"Namun, sikap dari PDI Perjuangan nanti akan kami bahas di dalam rapat kerja nasional yang nanti akan kami selenggarakan pada awal tahun depan," ucap Hasto.

Dalam mengkaji usulan tersebut, PDIP akan mempertimbangkan harapan rakyat dan aspek-aspek yang diatur dalam konstitusi.

"Suasana kebatinan ketika konstitusi mengamanatkan bahwa kepala daerah-wakil kepala daerah itu

dipilih secara demokratis melalui suatu pemilu yang jujur, nah inilah yang kemudian kita akan buka bersama, kita akan kaji, tetapi yang terpenting adalah kemanfaatan bagi peningkatan kualitas demokrasi itu," ucapnya.

Dia pun mengatakan bahwa sejatinya pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat dilakukan karena jabatan lima tahunan itu memerlukan basis legitimasi dan dukungan kuat dari rakyat.

Kendati demikian, Hasto mengaku dapat memahami ihwal munculnya usulan kepala daerah dipilih DPRD, seperti yang dilontarkan Ketua Umum

Partai Golkar Bahliil Lahadalia yang kemudian dipertimbangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Kita juga tidak menutup mata apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo itu akibat pemilihan secara langsung itu menimbulkan beban biaya yang begitu besar, biaya kampanye, biaya penggalangan, biaya komunikasi politik, yang menyebabkan banyak kepala daerah terjebak kepada persoalan-persoalan terkait dengan korupsi," kata dia. (gus,ant,mol/dya)

Tahapan Evolusi Pilkada:

- **MASA ORDE BARU (PILKADA TIDAK LANGSUNG):**
Kepala daerah dipilih oleh DPRD, bukan oleh rakyat secara langsung.
- **ERA REFORMASI (PILKADA LANGSUNG):**
 - **Payung Hukum:** UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
 - **Ciri Khas:** Rakyat memilih langsung kepala daerah (Gubernur, Bupati, Walikota) pertama kali tahun 2005. Memperkuat legitimasi, namun muncul isu politik uang dan sengketa hasil.
- **PILKADA SERENTAK (GELOMBANG PERTAMA):**
 - **Payung Hukum:** UU No. 1 Tahun 2015 (yang menetapkan Perppu No. 1/2014 menjadi UU).
 - **Ciri Khas:** Pilkada pertama kali serentak di berbagai daerah pada 2015, meminimalisir biaya dan dinamika pemilu terpisah.
- **PILKADA SERENTAK NASIONAL (PUNCAK EVOLUSI):**
 - **Payung Hukum:** UU No. 10 Tahun 2016 (Perubahan Kedua atas UU No. 1/2015).
 - **Ciri Khas:** Mempercepat keserentakan di seluruh Indonesia pada November 2024, berdasarkan amanat putusan MK No. 14/2013, untuk efisiensi dan konsolidasi demokrasi.
 - **Payung Hukum Utama Saat Ini:** Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016: Mengatur perubahan UU Pilkada, menjadi landasan hukum Pilkada serentak, termasuk jadwal nasional 2024.

PAN Satu Pemikiran soal Gagasan Koalisi Permanen Parpol

Partai Amanat Nasional (PAN) secara terbuka menyatakan kesamaan pandangan dengan Partai Golongan Karya (Golkar) terkait wacana pembentukan koalisi partai politik (parpol) secara permanen. Kesepahaman ini muncul setelah Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi, menanggapi pernyataan Ketua Umum Golkar Bahliil Lahadalia. Gagasan koalisi permanen dinilai sebagai langkah strategis dalam meletakkan fondasi sistem presidensial Indonesia di masa mendatang.

Pernyataan tersebut disampaikan Viva Yoga Mauladi dalam keterangan resminya di Jakarta dikutip Minggu (7/12/2025). Ia mengapresiasi inisiatif dari Golkar yang mengangkat isu koalisi permanen sebagai agenda penting. Wacana ini diharapkan dapat memberikan stabilitas politik jangka panjang bagi pemerintahan.

Menurut Viva, jika konsep koalisi permanen ini disepakati oleh seluruh partai, maka perlu diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (Pemilu). Hal ini akan memastikan legalitas dan implementasi koalisi tersebut dalam sistem politik nasional. Pembahasan lebih lanjut akan menunggu jadwal revisi UU Pemilu yang akan datang.

Pengalaman Viva Yoga Mauladi sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2009-2019 memberikan perspektif menarik terkait wacana koalisi permanen. Ia mengaku pernah dua kali menjadi anggota Panitia Khusus (Pansus) RUU Pemilu. Dalam setiap pembahasan undang-undang tersebut, isu mengenai koalisi permanen selalu menjadi topik diskusi yang hangat dan relevan.

Meski demikian, fakta menunjukkan bahwa Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang menjadi dasar hukum penyelenggaraan pemilu 2019 dan 2024, belum mengatur secara spesifik mengenai pembentukan koalisi permanen. Tidak ada pasal yang secara eksplisit membahas mekanisme atau keberadaan koalisi semacam ini, baik sebelum maupun setelah pemilihan presiden dilaksanakan. Kondisi ini menyoroti perlunya penyesuaian regulasi jika gagasan koalisi permanen ingin diimplementasikan.

Oleh karena itu, PAN akan mencermati perkembangan jadwal revisi UU Pemilu yang akan datang. Revisi ini merupakan kodifikasi dari tiga undang-undang penting, yaitu UU tentang Pemilihan Presiden (Pilpres), UU Penyelenggara Pemilu, serta UU Pemilihan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota. Masuknya klausul koalisi permanen ke dalam

revisi ini akan menjadi langkah krusial untuk mewujudkan ide tersebut secara legal dan konstitusional.

Viva Yoga Mauladi menegaskan bahwa "jika koalisi permanen menjadi keputusan politik seluruh partai, maka harus masuk di pasal di Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (Pemilu)." Hal ini penting untuk memberikan kepastian hukum dan landasan operasional bagi sistem koalisi yang diusulkan. Tanpa payung hukum yang jelas, implementasi koalisi permanen akan menghadapi kendala serius. (tin,ant/dya)

LIBUR NATARU, AKAN ADA 119,5 JUTA PERGERAKAN WARGA

Pemerintah memprediksi sebanyak 119,5 juta orang akan bergerak untuk melakukan perjalanan, baik luar maupun dalam provinsi selama periode libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru). Angka tersebut merupakan 42% dari total seluruh penduduk di Indonesia.

Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menyampaikan bahwa sebanyak 119,5 juta orang berpotensi melakukan perjalanan, baik di luar maupun dalam provinsi, pada masa libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru 2025/2026).

Data tersebut merujuk pada hasil survei Potensi Pergerakan Orang pada Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 yang telah dilakukan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Badan Kebijakan Transportasi (Baketrans) bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), serta akademisi.

"Menurut survei 42,01 persen



penduduk Indonesia atau sekitar 119,5 juta orang berpotensi melakukan perjalanan," ujar Menhub Dudy dikutip Minggu (7/12/2025).

Dalam survei irltu, Hlhasilnya terdapat tren peningkatan potensi pergerakan masyarakat secara nasional pada masa Angkutan Natal

2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru 2025/2026) sebesar 2,71%, dari 39,30% pada tahun lalu menjadi 42,01% pada tahun ini.

Peningkatan terjadi, kata dia, seiring meningkatnya minat masyarakat untuk melakukan perjalanan pada masa Nataru

2025/2026 karena beberapa faktor, seperti waktu libur yang panjang di mana libur sekolah bersamaan dengan libur Nataru 2025/2026 serta kondisi infrastruktur transportasi yang semakin baik.

Faktor berikutnya, tingginya minat masyarakat untuk berwisata, aspek budaya terutama bagi masyarakat yang ingin merayakan Hari Natal di kampung halaman, serta aspek ekonomi.

Dudy menyampaikan bahwa penggunaan mobil pribadi jadi yang terbanyak menurut hasil survei, angkanya mencapai 42,78% atau 51,12 juta orang. Moda terbanyak berikutnya adalah sepeda motor sebesar 18,41% atau 22,00 juta orang, bus sebesar 8,17% atau 9,76 juta orang, mobil sewa sebesar 7,43% atau 8,87 juta orang, mobil travel sebesar 6,39% atau 7,64 juta orang.

Sementara itu moda lain yakni pesawat sebesar 3,57% atau 4,27 juta orang, kereta api jarak jauh sebesar 3,29% atau 3,94 juta orang, kapal penyeberangan sebesar 3,14% atau 3,75 juta orang, kapal laut sebesar 2,20% atau 2,62 juta orang, dan commuter line sebesar 1,93% atau 2,30 juta orang.

Menhub Dudy juga mengingatkan potensi cuaca ekstrem di laut bisa terjadi saat arus mudik libur Nataru 2026. Gelombang tinggi, angin kencang, dan hujan dengan intensitas tinggi dapat memengaruhi keselamatan pelayaran.

"Seluruh jajaran Ditjen Perhubungan Laut dan seluruh unit pelaksana di lapangan harus siaga 24 jam, tanpa kompromi," ujar Dudy saat membuka acara Rapat Kerja Direktorat Jenderal (Ditjen) Perhubungan Laut dan Rapat Koordinasi Angkutan Laut Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 di Jakarta, Minggu (7/17/2025).

Berdasarkan survei Potensi Pergerakan Orang pada masa Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, sebanyak 2,62 juta orang diprediksi melakukan perjalanan menggunakan moda transportasi laut. Dudy menekankan komitmen dan semangat untuk memastikan perjalanan masyarakat berlangsung selamat.

"Keselamatan adalah harga mati, keselamatan yang terbaik adalah keselamatan yang bahkan tidak disadari karena tidak ada insiden yang terjadi," ujar dia.

Menhub kembali menyinggung insiden tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali dan peristiwa Kebakaran KM Barcelona VA di perairan Talise, Sulawesi Utara beberapa waktu lalu. Insiden-insiden di laut yang membawa korban ini membawa pesan yang tegas, kata dia, pentingnya mengutamakan keselamatan.

"Kapal yang tidak memenuhi standar tidak boleh diberikan izin berlayar. Informasi cuaca ekstrem harus tersampaikan cepat dan jelas," imbuhnya. (tin, blo, ist/dya)

REKAYASA LALIN LIBUR NATARU

Pokok Kebijakan

- Penerapan one way dan contra flow di sejumlah ruas tol.
- Contra flow diberlakukan menyesuaikan kondisi lalu lintas di lapangan.
- Rekayasa dapat dievaluasi setiap saat sesuai situasi.
- Seluruh pekerjaan konstruksi tol dihentikan pada 16 Desember 2025 sampai 4 Januari 2026 untuk mengurangi kepadatan.

Jadwal Contra Flow Nataru

- **Tol Jagorawi**
Arah Jakarta (KM 21-KM 8)
- 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28 Desember 2025 (pukul 14.00-19.00)
- 2-4 Januari 2026 (pukul 14.00-19.00)
- **Tol Jakarta-Cikampek**
Arah Cikampek (KM 47-KM 70)
- 19, 23, 24 Desember 2025 (pukul 06.00-14.00)
- 20, 21, 25, 26, 27, 28 Desember 2025 (pukul 06.00-14.00)
- **Tol Jakarta-Cikampek**
Arah Jakarta (KM 70-KM 47)
- 21, 26, 27, 28 Desember 2025 (pukul 18.00-24.00)
- 29 Desember 2025 (pukul 00.00-08.00)
- 1-4 Januari 2026 (pukul 18.00-24.00)

Rekayasa Lalin Mulai 19 Desember

tentang Pengaturan Lalu Lintas Jalan Serta Penyeberangan Selama Masa Angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

"Ini bukanlah hal yang baru dalam manajemen rekayasa lalu lintas di masa libur panjang. Harapannya perjalanan masyarakat bisa lebih selamat dan lancar," ujar Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Aan Suhanan di Jakarta.

Ia menjelaskan, pemberlakuan sistem lajur pasang surut (contra flow) dari Jakarta-Cikampek mulai dari KM 47-70 berlaku pada tanggal 19, 23, 24 Desember 2025 mulai pukul 06.00 sampai dengan 14.00 waktu setempat.

Kemudian, pada tanggal 20, 21, 25, 26, 27, dan 28 Desember 2025 masing-masing mulai pukul 06.00 sampai dengan 14.00 waktu setempat.

Kementerian Perhubungan juga melakukan pengaturan pergerakan angkutan orang dan barang di pelabuhan penyeberangan selama periode angkutan Natal dan Tahun Baru 2026.

Pengaturan ini dilakukan di empat pelabuhan utama yakni Merak, Bakauheni, Ketapang, dan Gilimanuk.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Aan Suhanan mengatakan kementerannya telah memperkirakan akan terjadi pe-

ingkatan pergerakan masyarakat dan volume kendaraan di sektor penyeberangan, sehingga diperlukan langkah pengaturan. "Beberapa pelabuhan pendukung juga kami siapkan untuk membantu memecah kepadatan kendaraan dan mencegah terjadinya penumpukan di satu lokasi," kata Aan.

Pengaturan ini menyasar pada Pelabuhan Merak, Pelabuhan Bakauheni, Pelabuhan Ciwandan, Pelabuhan BBJ Bojonegara (Serang-Banten), Pelabuhan BBJ Muara Pilu (Lampung Selatan), Pelabuhan PT Wijaya Karya Beton Tbk (Bakauheni), Pelabuhan PT Krakatau Bandar Samudera (Cilegon) dan Pelabuhan Panjang (Lampung).

Pada 19 Desember 2025 pukul 15.00 - 4 Januari 2026 pukul 24.00 waktu setempat yang dapat melalui Pelabuhan Merak tujuan Sumatra yakni penumpang pejalan kaki, kendaraan golongan I (sepeda), kendaraan bermotor golongan IVA, mobil barang golongan IVb, kendaraan bermotor golongan Va, mobil barang golongan Vb dan kendaraan bermotor golongan VIa (Lintasan Merak-Bakauheni). (wid, blo/dya)

KEMENTERIAN Perhubungan, Korlantas Polri dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) akan menerapkan sistem lajur pasang surut atau contra flow dan sistem satu arah (one way) pada periode libur Natal 2025 dan tahun baru 2026.

Aturan itu secara resmi tertuang pada Surat Keputusan Bersama (SKB)

INSENTIF RP 6 JUTA/HARI DAPUR MBG DIPOTONG JIKA TAK SESUI STANDAR

Badan Gizi Nasional (BGN) akan memangkas insentif bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tidak sesuai standar operasional prosedur (SOP). Diketahui tiap dapur ada mendapatka sebesar Rp 6 juta per hari. Harapannya, kualitas dapat terjaga untuk terhindar dari kemungkinan insiden keamanan pangan.

Pernyataan ini diutarakan Wakil Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang dalam pengarahannya dalam acara Koordinasi dan Evaluasi Program BGN di Hotel Aston Cirebon, Minggu, (7/12/2025).

Nanik mewanti-wanti agar Para Mitra, Yayasan, dan Kepala SPPG selalu memenuhi SOP, sehingga terhindar dari kemungkinan insiden keamanan pangan. Insentif sebesar Rp 6 juta untuk masing-masing SPPG itu memang ditujukan agar SPPG memenuhi SOP.

"Kalau ternyata dapur Anda tidak sesuai standar atau nilainya rendah, insentif fasilitas akan dipangkas. Jangan sembarangan!" katanya.

Insentif fasilitas SPPG sebesar Rp 6 juta per hari adalah pembayaran tetap sebagai kompensasi atas ketersediaan fasilitas yang memenuhi standar BGN. Pemberian insentif fasilitas SPPG ini bertujuan untuk menjamin kesiapsiagaan (stand of readiness).

Pembayaran insentif fasilitas SPPG tidak bergantung kepada jumlah porsi yang dilayani masing-masing SPPG sehingga menimbulkan kecemburuan. Nanik mengaku diprotes mitra dan yayasan yang merasa diperlakukan tidak adil.

"Masa saya yang sudah bangun dapur 400 meter persegi di tahap pertama disamakan dengan dapur-dapur sekarang yang kurang dari 400 meter persegi," kata Wakil Kepala BGN bidang Komunikasi Publik dan Investigasi itu menirukan protes mereka.

Oleh karena itu, Nanik memastikan bahwa pihaknya akan tetap menerapkan prinsip keadilan kepada seluruh SPPG. Tim appraisal disebut akan bekerja secara independen.

"Anda jangan keenakan dengan insentif besar ini. Sudah dapat insentif Rp 6 juta per hari kok malah onggang-onggang. Blender rusak nggak mau ganti, akhirnya Kepala SPPG, Ahli Gizi dan Akuntan patungan beli blender. Gimana tuh," beber Nanik.

Selain pemenuhan SOP dan kelengkapan standar dapur MBG, setiap SPPG juga harus memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi



Petugas mengangkut paket Makan Bergizi Gratis di dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polda Kepri, Batam, Kepulauan Riau, 25 Agustus 2025. (Dok.Antara)

(SLHS), Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) dan Sertifikat Halal, serta para relawan harus mendapat Pelatihan Penjamah Makanan.

Untuk Kota Cirebon, dari 21 SPPG yang sudah beroperasi, 15 SPPG sudah

memiliki SLHS, 11 SPPG sedang dalam proses pengajuan, sementara 2 SPPG sama sekali belum mengajukan SLHS. Sedangkan untuk Kabupaten Cirebon, dari 139 SPPG yang sudah beroperasi, 106 SPPG telah memiliki SLHS, 24 SPPG

Masih Ada SPPG Setop Beroperasi karena Seretnya Dana Operasional

BEBERAPA Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) setop beroperasi akibat seretnya dana operasional yang dikirim Badan Gizi Nasional (BGN). Di Waung 2 di Desa Waung, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur misalnya sudah dua hari tidak berproduksi.

Kepala SPPG Waung 2 Kecamatan Boyolangu Della Ananda Setyarini di Tulungagung, Sabtu (6/12/2025), mengatakan layanan akan kembali dijalankan apabila pendanaan untuk periode berikutnya cair.

"Selama ini pengajuan anggaran dilakukan setiap dua pekan melalui proposal kepada BGN," kata Della, dikutip Antara.

Setelah disetujui, lanjut dia, dana operasional ditransfer dan digunakan untuk menjalankan pelayanan selama dua minggu ke depan.

"Polanya memang pengajuan setiap dua minggu. Namun, dana yang masuk pekan ini setelah dihitung akuntan hanya cukup sampai Kamis (4/12/2025),

sehingga operasional terpaksa dihentikan pada Jumat dan Sabtu," kata Della.

SPPG Waung 2 melayani 3.571 penerima manfaat dari 14 sekolah mulai jenjang SD, SMP hingga MA.

Penghentian sementara dilakukan untuk menghindari kekurangan bahan dan operasional yang bisa berdampak pada kualitas pelayanan gizi.

Della menyampaikan pihaknya telah kembali mengajukan proposal untuk periode dua minggu berikutnya.

Ia berharap dana dapat ditransfer sebelum awal pekan depan agar kegiatan pelayanan dapat segera berjalan normal.

"Harapannya sebelum Senin (8/12/2025) sudah cair, sehingga layanan bisa kembali berjalan seperti biasa," ujarnya.

Kondisi serupa dialami, Dapur Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Serang. Hal itu terjadi karena Badan Gizi Nasional (BGN) belum membayar biaya operasional.

sedang dalam proses uji, sementara 9 SPPG masih belum mengajukan.

"Tolong ya... yang belum harus segera mendaftar. Saya beri waktu 1 bulan. Kalau dalam 1 bulan belum juga mendaftarkan diri ke Dinas Kesehatan, saya perintahkan agar di-suspend," tegas Nanik.

BGN juga menyatakan bahwa pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dilarang memecat relawan yang bekerja di dapur mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG), meski saat ini terjadi pengurangan jumlah penerima manfaat.

Nanik Sudaryati Deyang menjelaskan, pengurangan jumlah penerima manfaat MBG merupakan bagian dari kebijakan BGN untuk menjaga kualitas pemenuhan gizi kepada para penerima manfaat. (tin,ist/dya)

PENYERAPAN ANGGARAN MBG 2025 (11 NOV 2025)

Januari	Rp52,8 miliar
Februari	Rp1,18 triliun
Maret	Rp1,80 triliun
April	Rp2,54 triliun
Mei	Rp3,85 triliun
Juni	Rp6,02 triliun
Juli	Rp7,90 triliun
Agustus	Rp 13,20 triliun
September	Rp19,38 triliun
Oktober	Rp35,40 triliun
November	Rp43,47 triliun

Pada Jumat (5/12/2025), sekolah yang menerima manfaat MBG dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tidak mendapatkan MBG hingga waktu yang belum bisa dipastikan.

"Ya betul mas," kata Kepala SPPG Cipocok Jaya Gelam, Imam Hendar Setiono, Minggu (7/12/2025). (ant,ist/dya)

Bencana di Kota Malang Meningkat dalam 3 Tahun Terakhir, Didominasi Banjir



Ilustrasi: Kondisi salah satu rumah warga pasca banjir di Gang Sudimulyo, Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, Jumat (5/12/2025) lalu. (Santi/Lentera)

MALANG - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Malang menyebut adanya tren peningkatan bencana alam dalam tiga tahun terakhir. Banjir yang paling mendominasi laporan. Terutama akibat curah hujan tinggi serta perubahan cuaca ekstrem di wilayah Kota Malang.

Kepala BPBD Kota Malang, Prayitno,

menjelaskan pada tahun 2022 pihak-nya mencatat 479 kejadian bencana. Angka itu sempat menurun pada 2023 menjadi 258 kejadian, namun kembali mengalami lonjakan pada 2024 dengan total 450 titik sebaran bencana alam.

"Banjir yang mendominasi, ya. Kalau di 2024 itu total titik sebaran bencana ada sebanyak 450 kejadian. Selain intensitas hujan yang tinggi, mungkin perlu treatment pada sistem drainase dan lain sebagainya," ujar Prayitno, dikutip pada Minggu (7/12/2025).

Untuk tahun 2025, BPBD Kota Malang masih menunggu rekapitulasi hingga akhir Desember, namun data sementara per awal November 2025 menunjukkan sudah ada 490 kejadian bencana alam. Jumlah tersebut belum termasuk 39 titik banjir yang terjadi

pada Kamis (4/12/2025) lalu.

Prayitno menegaskan, peningkatan kejadian bencana tidak lepas dari dampak perubahan iklim. Curah hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi yang terjadi sepanjang tahun turut mempengaruhi kondisi permukaan tanah dan lingkungan, sehingga memicu banjir di banyak titik rawan di Kota Malang.

Selain banjir, BPBD juga mencatat bencana lain seperti tanah longsor, angin kencang, dan bencana hidrometeorologis lain yang frekuensinya semakin meningkat.

Dalam upaya penanganan, Prayitno mengatakan, pihaknya mengandalkan laporan awal dari kelurahan tangguh bencana. Setelah laporan masuk, petugas melakukan asesmen untuk mengetahui tingkat kerusakan, penyebab, serta dampak yang ditimbulkan.

"Hasil asesmen ini menjadi dasar penyaluran bantuan sesuai kebutuhan di lokasi terdampak," katanya.

Apabila terdapat laporan terkait korban luka atau kondisi kesehatan warga, BPBD bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota Malang untuk

penanganan lanjutan. Sementara untuk kerusakan konstruksi seperti rumah dan jembatan, asesmen dilakukan oleh Tim Reaksi Cepat (TRC) dari Dinas PUPR-PKP.

"TRC ini kami bentuk dari teman-teman lintas OPD agar data asesmen bisa menjadi dasar pengambilan keputusan di tingkat pimpinan," terangnya.

Prayitno juga me-nambahkan, masya-rakat terutama melawan tangguh dan kelurahan tangguh bencana, berperan aktif dalam pelaporan dan penanganan darurat.

Sementara itu, disinggung terkait ketersediaan sistem peringatan dini atau Early Warning System (EWS), BPBD Kota Malang saat ini memiliki 24 unit yang tersebar di sejumlah titik rawan bencana. Namun, Prayitno mengakui sebagian perangkat EWS milik BPBD perlu dilakukan pemeliharaan. "Sebagian besar EWS dibuat pada tahun 2020. Untuk saat ini, belum ada rencana penambahan unit EWS. BPBD hanya mendapatkan alokasi anggaran untuk peremajaan, meliputi penggantian baterai, kabel, hingga penangkap sinar matahari," katanya. (Santi/Dya)

Dua Pajak Daerah Kabupaten Malang Terancam Gagal Target, Salah Satunya Parkir

MALANG - Dua jenis pajak daerah Kabupaten Malang terancam gagal mencapai target hingga akhir 2025. Walhasil, capaian pendapatan asli daerah (PAD) juga bakal terpengaruh.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Malang, Made Arya Wedanthara, mengatakan dua jenis pajak yang mengalami perlambatan adalah Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) tenaga listrik serta PBJT jasa parkir.

"Hingga awal Desember 2025, PBJT tenaga listrik dan PBJT jasa parkir masih tercatat di bawah 80 persen," ujar Made, dikutip pada Minggu (7/12/2025).

Berdasarkan data Bapenda, total realisasi dari 12 jenis pajak daerah Kabupaten Malang telah mencapai Rp679.081.712.082 atau 93 persen dari target Rp730.200.171.372.

Made menjelaskan, PBJT tenaga listrik baru terealisasi Rp118.686.546.051 atau 77,38 persen dari target Rp153.373.412.210. Sementara PBJT jasa parkir tercatat Rp1.189.687.508 atau 74,90 persen

dari target Rp1.588.295.198.

Dikatakannya, rendahnya realisasi PBJT tenaga listrik dipengaruhi kebijakan diskon PBJT pada Januari-Februari 2025 serta pemberian keringanan pajak untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

"Program itu memang menurunkan penerimaan pajak, tetapi memberikan manfaat besar bagi masyarakat," katanya.

Lebih lanjut, pihaknya memproyeksikan PBJT tenaga listrik dapat mencapai Rp131-Rp132 miliar atau sekitar 85-86 persen dari target pada akhir Desember 2025 ini. Angka tersebut diperkirakan menjadi capaian maksimal.

Namun untuk PBJT jasa parkir, peluang mencapai target dinilai lebih kecil. Dengan kekurangan sekitar Rp400 juta dari target, capaian akhir tahun diproyeksikan hanya berada di kisaran 75-77 persen.

"Waktunya tidak memungkinkan untuk mencapai 80 persen. Kami optimistis capaian terbaik ada di

sekitar 75 sampai 77 persen," kata Made.

Meskipun dua jenis pajak masih tertinggal, Made menyebut ada 5 jenis pajak daerah lainnya yang justru sudah melampaui target, yakni PBJT makanan dan minuman yang tercatat mencapai Rp20.559.062.151 atau 109,48 persen dari target Rp18.778.240.386. Kemudian PBJT jasa kesenian dan hiburan mencapai Rp8.119.857.286 atau 101,18 persen.

Selain itu, pajak reklame tercatat Rp4.978.131.469 atau 100,99 persen dari target Rp4.929.291.120.

Pajak air tanah juga melampaui target Rp6.993.810.697 dengan realisasi Rp7.382.401.461 atau 105,56 persen. Lalu Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tercatat mencapai Rp120.105.810.365 atau 104,78 persen dari target Rp114.621.487.422.

Made berharap, capaian lima jenis



Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang, Made Arya Wedanthara. (Santi/Lentera)

pajak tersebut dapat menutup kekurangan dari dua pajak yang diperkirakan tidak mencapai target. "Kami tetap optimis realisasi pajak daerah bisa mendekati target keseluruhan. Semoga capaian pajak lainnya dapat membantu menutup kekurangan," pungkasnya. (Santi/Dya)

Perang Asia Makin Nyata

JET TEMPUR CHINA BIDIK PESAWAT JEPANG

Pecahnya perang di Asia makin mendekati kenyataan. Terbaru, jet tempur China dilaporkan mengarahkan radar kendali tembak ke pesawat Jepang di atas perairan internasional dekat Kepulauan Okinawa dalam dua insiden terpisah. Diketahui, hubungan dua negara tersebut terus memanas akibat isu Taiwan.

Jet tempur China mengunci radar pengendali tembakan mereka ke arah pesawat Jepang di atas perairan internasional di dekat kepulauan Okinawa, Jepang. Insiden itu dikecam oleh Menteri Pertahanan Jepang dan menyebutnya 'berbahaya'.

"Pengarahan radar ini melampaui apa yang diperlukan untuk penerbangan pesawat yang aman," kata Menteri Pertahanan Jepang Shinjiro Koizumi dalam sebuah unggahan di X dilihat Minggu (7/12/2025)..

Jepang, katanya, telah mengajukan protes kepada China atas insiden yang 'menyesalkan' tersebut. Penguncian radar pengendali tembakan merupakan salah satu tindakan paling mengancam yang dapat dilakukan pesawat militer karena menandakan potensi serangan sehingga memaksa pesawat yang menjadi target untuk mengambil tindakan mengelak.

Jepang dan Australia telah mendesak ketenangan. Dilansir Associated Press, Minggu (7/12/2025), Menteri Pertahanan



Pesawat tempur J-15 dari kapal induk Liaoning Tiongkok melakukan latihan di kawasan Laut Cina Selatan. (Dok. Reuters)

Jepang Shinjiro Koizumi mengatakan Jepang secara resmi memprotes insiden tersebut dan menyebutnya tindakan 'sangat disesalkan dan berbahaya yang "melebihi ruang lingkup yang diperlukan untuk operasi pesawat yang aman'.

"Kami telah mengajukan protes keras kepada pihak China dan menuntut tindakan pencegahan yang ketat," kata Koizumi.

Kementerian Pertahanan Jepang mengatakan pesawat militer China J-15 lepas landas dari kapal induk China Liaoning di dekat pulau selatan Okinawa pada Sabtu (6/12/2025) dan 'terputus-putus' mengunci radar-nya pada jet tempur F-15 Jepang pada dua kesempatan selama sekitar tiga menit di sore hari dan selama sekitar 30 menit di malam hari.

Namun, Jepang tidak

menjelaskan apakah insiden penguncian radar tersebut melibatkan J-15 China yang sama pada kedua kesempatan tersebut. Jet tempur Jepang dikerahkan untuk mengejar jet tempur China yang sedang melakukan latihan lepas landas dan mendarat di Pasifik.

Jepang dan Australia, yang menteri pertahanannya telah mengadakan pembicaraan terjadwal di Tokyo pada hari ini, menyatakan kekhawatiran atas perkembangan tersebut.

"Kami sangat prihatin dengan tindakan China dalam 24 jam terakhir. Kami berharap interaksi tersebut akan aman dan profesional," ujar Menteri Pertahanan Australia Richard Marles dalam konferensi pers bersama pada hari Minggu setelah mengadakan pembicaraan dengan Koizumi.

Dia mengatakan Australia tidak ingin melihat perubahan apa pun pada status quo di Selat Taiwan. Dia menambahkan China adalah mitra dagang terbesar negaranya dan ingin memiliki hubungan yang produktif dengan Beijing. (afp,rtr,ist/dya)

Citra Satelit Temukan Pangkalan Militer China di Pulau Buatan



Sebuah lapangan terbang, bangunan, dan struktur terlihat di pulau buatan yang dibangun oleh China di Mischief Reef, Kepulauan Spratly, Laut Cina Selatan. (Dok/Getty)

kawasan tersebut.

China tetap kukuh menguasai sebagian besar Laut Cina Selatan dengan mengacu pada apa yang disebut sebagai "hak historis". Namun, dasar tersebut telah ditegaskan tidak memiliki landasan hukum dalam putusan Permanent Court of Arbitration di Den Haag pada 2016.

Dalam pernyataan pada Juli lalu, juru bicara Kementerian Luar Negeri China menegaskan kembali penolakan Beijing terhadap putusan arbitrase Laut Cina Selatan.

"Posisi China terkait 'Putusan Arbitrase 2016 di Laut Cina Selatan' konsisten dan jelas. 'Putusan' tersebut hanyalah selembar kertas bekas yang ilegal, batal demi hukum, dan tidak mengikat. China tidak me-

nerima maupun mengakui 'putusan' tersebut, dan tidak akan pernah menerima klaim atau tindakan apa pun yang timbul dari putusan tersebut. Kedaulatan teritorial, hak, dan kepentingan maritim China di Laut Cina Selatan tidak akan terpengaruh oleh 'putusan' tersebut dengan cara apapun."

Sebagai bagian dari strategi memperketat kontrol, Beijing mempertahankan kehadiran konstan kapal perang dan penjaga pantai, didukung oleh terumbu karang yang telah direklamasi menjadi pos-pos dengan infrastruktur militer, termasuk landasan udara, radar, hingga sistem pertahanan.

Aktivitas tersebut kerap ditantang Amerika Serikat yang menjalankan operasi Freedom of Navigation serta patroli bersama para sekutu, termasuk Filipina.

The Asia Maritime Transparency Initiative (AMTI) di Center for Strategic and International Studies, sebuah lembaga kajian berbasis di Washington, D.C., mengatakan bahwa mereka mengidentifikasi sejumlah fasilitas baru di tiga pos terluar militer China, yakni Fiery Cross Reef, Mischief Reef, dan Subi Reef. (new,ist/dya)

PERBANDINGAN KEKUATAN MILITER CHINA VS JEPANG

1. Indeks & Posisi Militer

- China memiliki Power Index 0,0788 dan berada di peringkat 3 dunia menurut Global Fire Power.
- Jepang memiliki Power Index sekitar 0,1839 dan menduduki peringkat 8 dunia.

2. Sumber Daya Manusia dan Mobilisasi

- POPULASI:**
- China : 1,41 miliar jiwa.
 - Jepang : 123 juta jiwa.

- PERSONEL AKTIF:**
- China : 2,5 juta
 - Jepang : 261 ribu.

- CADANGAN:**
- China : 510 ribu
 - Jepang : 56 ribu.

3. Kekuatan Udara

- JUMLAH PESAWAT MILITER TOTAL:**
- China : 3.309 unit,
 - Jepang : 1.443 unit.

- PESAWAT TEMPUR:**
- China : 1.212 unit;
 - Jepang : 217 unit.

4. Kekuatan Darat

- TANK UTAMA:**
- China sekitar 6.800 unit,
 - Jepang hanya 521. (FAJAR)

5. Kekuatan Laut

- TOTAL KAPAL MILITER:**
- China memiliki jumlah armada sangat besar, jauh melebihi Jepang.

TETAP BUGAR DI USIA 73 TAHUN, INTIP POLA MAKAN VLADIMIR PUTIN

Presiden Rusia Vladimir Putin kerap menjadi sorotan publik, bukan hanya karena aktivitas politiknya, tetapi juga karena bagaimana ia menjaga kebugaran di usia 73 tahun. Salah satu aspek yang paling sering dibahas media pemerintah Rusia adalah pola makan hariannya, yang disebut-sebut sangat teratur dan disiplin. Berikut tips dan trik sang presiden.

Menurut pemaparan Russia Beyond, sarapan menjadi bagian paling konsisten dari rutinitas sang presiden. Menunya dimulai dengan bubur, ditemani tvorog, keju segar fermentasi khas Eropa Timur, yang biasanya dicampur

madu. Dikutip dari Hindutimes, Putin juga mengonsumsi telur puyuh mentah yang dimakan langsung, serta jus bit dan lobak sebagai bagian dari sarapannya. Soal makanan manis, ia jarang mengonsumsinya. Madu menjadi sumber gula utamanya,

sementara es krim hanya ia nikmati sesekali. Ia pernah mengatakan lebih menyukai beras dan buckwheat, tetapi tidak terlalu berminat terhadap oat.

Sayuran hampir selalu ada dalam menu hariannya, seperti tomat, mentimun, dan salad. Untuk sumber protein, ia lebih memilih ikan, meski domba juga termasuk favoritnya.

Pada siang hari, Putin hanya makan buah atau kefir bila tersedia. Sementara makan malam sering ia lewatkan sama sekali. Ketika bepergian, ia mencicipi hidangan lokal namun tetap dalam porsi kecil.

Menariknya, pola sarapan Putin sejalan dengan berbagai penelitian nutrisi modern. Menu tinggi protein seperti tvorog, telur puyuh, dan ikan diketahui memberi rasa kenyang yang lebih kuat dibanding sarapan tinggi karbohidrat.

Studi pada 2013 menunjukkan bahwa sarapan kaya protein merangsang pelepasan hormon kenyang seperti PYY dan GLP-1 dalam jumlah lebih tinggi.

Penelitian lain menemukan peserta yang rutin sarapan tinggi

protein cenderung lebih sedikit ngemil di malam hari, karena rasa kenyang bertahan lebih lama. Meski demikian, setiap orang memiliki kebutuhan nutrisi berbeda. Pola makan yang cocok untuk satu individu belum tentu sesuai untuk orang lain. (hin ist/dya)

Studi: 5 Jenis Makanan Meningkatkan Kesehatan Jantung

Memangkas lemak di usia yang tidak lagi muda memang menantang. Namun tidak ada yang mustahil. Anda bisa mencoba menyisipkan menu sarapan tinggi protein berikut guna membakar lemak perut di usia 40 tahun ke atas. Ahli diet olahraga Tara Collingwood mengatakan protein merupakan sahabat metabolisme setelah usia 40.

"Setelah usia 40, otot menjadi sekutu terbaik metabolisme Anda. Memulai hari Anda dengan sarapan kaya protein membantu menjaga otot, menstabilkan gula darah, dan mengurangi lemak perut seiring waktu," kata Collingwood seperti dikutip dari Eat This Not That!.

Dia pun menyarankan untuk mengonsumsi sarapan tinggi protein agar lebih banyak lemak terbakar. Apa saja?

Omelet sayuran dengan alpukat dan roti gandum utuh

Telur dan roti memang sarapan yang praktis dan penuh gizi. Olah telur jadi omelet sayuran ditambah alpukat. Kemudian pilih roti dari biji-bijian atau gandum utuh.

Telur, kata Collingwood, merupakan sumber protein berkualitas yang menjaga massa otot dan mempertahankan rasa kenyang. Kemudian serat dan lemak sehatnya menjaga gula darah tetap stabil sehingga mencegah keinginan makan berlebih.

Greek yogurt dengan buah beri dan kacang yogurt*

Greek yogurt termasuk jenis yogurt yang tinggi protein. Dalam satu sajian Greek yogurt mengandung hingga 20 gram protein.

Sebaiknya padukan dengan buah beri dan kacang-kacangan yang mendukung metabolisme dan rasa kenyang lebih lama.

Smoothie protein dengan bayam dan beri

Collingwood merekomendasikan menu sarapan yang ampuh membakar lemak perut seperti smoothie protein. Smoothie terdiri dari bubuk protein, beri, dan bayam.

Sarapan ini memberikan asupan 25-30 gram protein. Kemudian tambahkan biji chia atau oat untuk membantu rasa kenyang.

Pancake keju cottage atau wafel protein

Ingin bakar lemak dengan makanan enak? Anda bisa menyiapkan menu sarapan pancake atau wafel.

Anda cukup mengganti adonan pancake tradisional dengan keju cottage atau bubuk protein.

"Anda bisa makan panekuk dan tetap sehat selama Anda meningkatkan asupan protein untuk menjaga metabolisme Anda tetap aktif," kata Collingwood.

Quinoa, telur, dan sayuran

Lebih suka sarapan dengan nuansa gurih? Siapkan quinoa, telur, dan sayuran. Quinoa memberikan asupan protein dan serat nabati, sedangkan telur dan sayuran membuat menu ini jadi padat nutrisi.

"Semangkuk gurih seperti ini akan memberi Anda energi dan rasa kenyang yang tahan lama saat berolahraga di pagi hari," ujar Collingwood. (ist, wu ya)



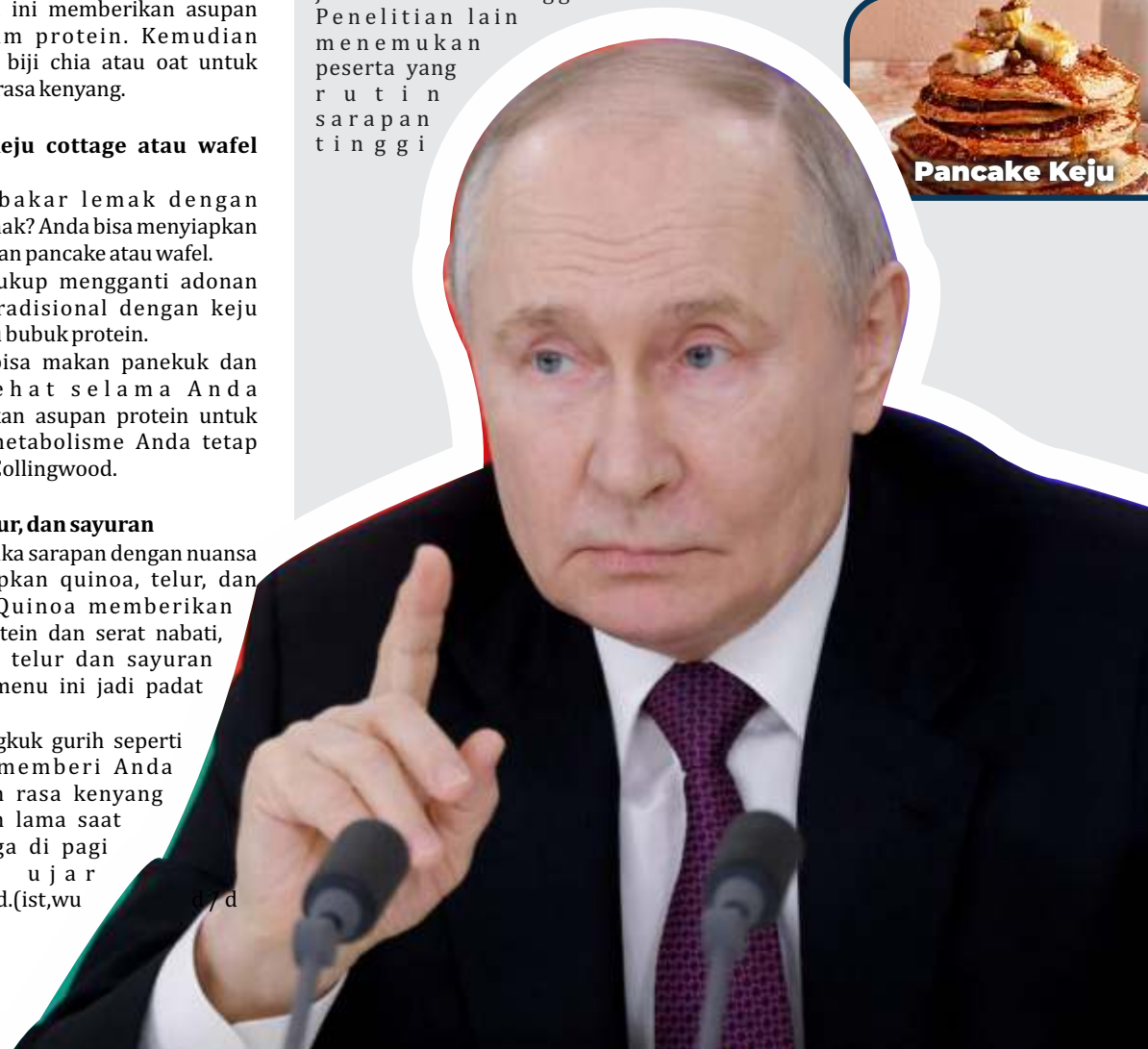
Omelet Sayur



Smoothie Bayam



Pancake Keju



WARNA PALING LANGKA DI ALAM: VIOLET

Di alam, warna biru sebenarnya cukup jarang muncul. Meski permukaan bumi dipenuhi warna hijau dan kita sering menjumpai kuning, oranye, merah, hingga pink pada berbagai tumbuhan dan hewan, biru hanya tampak pada sedikit jenis bunga, beberapa burung dengan tampilan unik, dan beberapa spesies katak tertentu. Lebih langka lagi dari biru, ada satu warna yang hampir tak pernah terlihat di alam yaitu violet.

Kelangkaan warna dalam kehidupan disebabkan oleh faktor fisika dan evolusi. Warna muncul dari pantulan panjang gelombang tertentu dalam spektrum elektromagnetik.

Panjang gelombang yang lebih pendek, seperti biru dan violet, membawa energi yang lebih tinggi, sementara panjang gelombang yang lebih panjang, seperti merah, memiliki energi yang lebih rendah.

Dikutip IFL Science, warna hijau terletak kira-kira di tengah spektrum yang terlihat, menjadikannya panjang gelombang yang ideal. Hijau adalah warna yang paling umum di alam karena fotosintesis, dasar

fundamental hampir semua kehidupan di Bumi. Tumbuhan mencapai fotosintesis dengan bantuan pigmen yang disebut klorofil.

Klorofil memantulkan cahaya hijau, sementara menyerap sebagian besar cahaya merah dan sebagian cahaya biru.

"Menyambut panjang gelombang merah dan biru adalah cara yang stabil dan efisien untuk menggairahkan elektron dalam klorofil, memungkinkan tanaman mengubah energi cahaya menjadi energi kimia," jelas studi tersebut.

Karena panjang gelombang yang terkait dengan hijau sebagian besar dipantulkan daripada diserap, inilah mengapa daun tampak berwarna hijau.

Kelangkaan warna lain di alam seringkali bermuara pada keseimbangan serupa: pigmen tidak hanya harus layak secara biokimia, tetapi juga harus melayani tujuan evolusioner (untuk kamuflase, sinyal, atau fotosintesis).

Lantas, mengapa biru begitu langka? Panjang gelombang cahaya biru yang pendek dan frekuensi yang tinggi berarti ia sangat energik.

Sebagian besar pigmen cenderung menyerapnya daripada memantulkannya. "Ini seperti seikat energi intens yang secara biokimia sulit untuk dipantulkan, jauh lebih mudah untuk menerima pukulan itu," catat studi tersebut.

Meskipun demikian, kehidupan telah menemukan cara untuk memanfaatkan warna biru. Organisme seperti burung tropis, sekitar 10 persen tumbuhan, dan kumbang, tidak selalu menggunakan pigmen sejati.

Sebaliknya, banyak yang mengandalkan struktur fisik mikroskopis yang menyebarkan cahaya untuk menghasilkan persepsi biru, fenomena yang dikenal sebagai structural coloration. Namun, ini adalah proses yang mahal dan sulit dikuasai.

Jika biru sulit diproduksi, violet lebih sulit lagi. Warna violet memiliki frekuensi yang lebih tinggi dan panjang gelombang yang lebih pendek daripada biru, menempatkannya di ujung spektrum cahaya yang paling energik.

Warna ini adalah versi ekstrem dari biru. Semua faktor yang membuat biru langka, seperti frekuensinya yang tinggi, lebih menonjol untuk violet. Inilah mengapa warna ini hampir tidak ada dalam organisme hidup.

Memproduksi violet melalui pigmen membutuhkan energi yang sangat tinggi. Selain itu, structural coloration untuk violet menjadi sangat sulit karena memerlukan struktur mikroskopis yang begitu

padat dan presisi, sehingga hanya sedikit organisme yang mampu mengembangkan mekanisme tersebut. Tidak heran jika warna ini jarang dijumpai di alam.

Kelangkaan warna-warna tertentu ini juga tercermin dalam budaya manusia. Di masa sebelum adanya pewarna kimia, warna biru dan ungu menjadi simbol kemewahan dan kekuasaan, sehingga kerap dikhususkan untuk para pemimpin besar, elit spiritual, serta tokoh-tokoh berpengaruh lainnya dalam masyarakat.

Tekstil dengan warna tersebut sering kali dianggap barang langka dan bernilai tinggi, sehingga hanya kalangan tertentu yang mampu memilikinya. (kcm,ist/dya)



HARIAN
LENTERA
Inspirasi Perubahan **TODAY**

HARIAN "LENTERA TODAY"
PIMPINAN PERUSAHAAN TARMUJI TALMACSI
OMBUDSMAN SUKARJITO (ID Sertifikasi 14319)
PENANGGUNG JAWAB ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
PIMPINAN REDAKSI ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
REDAKTUR PELAKSANA AGUSTINA WIDYAWATI (ID Sertifikasi 2567)
REDAKTUR LUTFIYU HANDI, NEISKA OLIVIANA (CO)

KORAN DIGITAL LENTERA TODAY
Terbit Senin - Jumat (12 Halaman)
download edisi digital pada web
www.lenteratoday.com
VERIFIKASI FAKTUAL DEWAN PERS
803/DP-Verifikasi/K/X/2021



BIRO: SURABAYA: YOLANDA APRILLIA PRADITHA, AMANAH NUR ASIAH, JOKO PRASETYO I **GRESIK:** ASEPTA YOGA P. (SERTIFIKASI WARTAWAN UTAMA) I **MOJOKERTO:** NUR HIDAYAH I **LAMONGAN:** L HANDI I **BLITAR:** ARIEF SUKAPUTRA I **KEDIRI:** GATOT SUNARKO I **JOMBANG :** SUTONO I **PASURUAN-PROBOLINGGO-PONOROGO :** IMAN SANTOSO I **BONDOWOSO- SITUBONDO-LUMAJANG-JEMBER-BANYUWANGI:** PURCAHYONO JULIATMOKO I **MADIUN:** WIWIET EKO PRASETYO (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA) I **MALANG RAYA:** SANTI WAHYU SANIA (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA), ISKANDAR Z. I **MADURA RAYA:** SAHLAN KURNIAWAN I **TRENGGALEK:** TINA W I **NGAWI:** DIMAS RIDHO SURYO BASKORO I **DKI JAKARTA:** FUAD HASSAN I **LOMBOK BARAT:** MUHAYYAN I **PALANGKA RAYA:** NOVITA MASNIARI

PENASEHAT HUKUM DR. NURIYANTO A. DAIM, SH, MH I **MARKETING COMMUNICATION** JOKO PRASETYO UTOMO, ISKANDAR ZULKARNAIN I **SEKERTARIS** FITRIYANTI SUTAN, FARADITA NUR FADHILAH
DESAIN GRAFIS PAULUS IVAN I **ALAMAT REDAKSI** JL RUNGKUT ASRI UTARA VI/26 I **TELP** 03187854491 I **PENERBIT** PT MEDIA HEBAT INSPIRASI INDONESIA I **ALAMAT PERCETAKAN** SMILE GRAFIKA JL RAYA KALIRUNGKUT 42 SURABAYA I **TELP IKLAN** 031-87854491 I **NIB** 91205006801134 I **HARGA IKLAN** RP 25.000 MM/KOLOM

Wartawan Lentera Today dalam setiap bertugas dilengkapi dengan tanda pengenal wartawan/kartu pers yang dikeluarkan perusahaan secara sah. Nama pemegang tanda pengenal wartawan/kartu pers Lentera Today tercantum di Box Redaksi. Siapa pun yang mengaku/mengatasnamakan Lentera Today, tanpa bisa menunjukkan surat/kartu tanda pengenal atau namanya tidak tercantum dalam Kotak Redaksi, agar ditolak/ dikonfirmasi/dilaporkan ke manajemen redaksi/perusahaan atau melalui nomor telepon yang tertera di Kotak Redaksi. Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, setiap wartawan Lentera Today dilarang menerima dan/atau meminta apa pun dengan alasan apa pun.

Hangat, Berani dan Futuristik Jadi Tren Warna Rambut 2026

Tahun 2026 diprediksi menghadirkan gelombang baru dalam dunia tata rambut. Teknologi pewarnaan semakin maju. Mulai dari pigmen bernutrisi, ammonia rendah, hingga teknik multidimensi. Hal ini membuat pilihan warna rambut semakin personal, intens, dan tetap sehat. Preferensi masyarakat juga bergeser ke arah ekspresi diri, yang tercermin melalui pilihan shade mulai dari klasik natural hingga futuristik metalik.

Berikut tren warna rambut yang diproyeksikan akan mendominasi 2026 disertai penjelasan ilmiah dan teknis masing-masing shade.

Bronde (Brown Blonde)

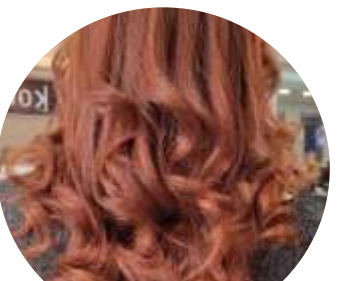
Bronde adalah hasil perpaduan tone brunette (cokelat) dan blonde (pirang) yang menghasilkan warna natural keemasan yang lembut. Warna ini termasuk multidimensional shade, karena menampilkan kombinasi highlight dan lowlight untuk menciptakan efek rambut lebih berbodi dan bercahaya.



Bronde (Brown Blonde)



Butter Blonde & Golden Naturals



Copper, Cinnamon, & Ginger

Cocok untuk warna kulit warm, neutral, dan olive. Pigmen keemasan memantulkan cahaya, membuat wajah terlihat lebih cerah dan sehat secara visual. Teknis salon sering menggunakan teknik balayage, root smudge, atau melt untuk hasil halus tanpa batas warna.

Bronde ideal untuk kamu yang ingin transisi dari rambut gelap ke warna lebih terang tanpa terlihat mencolok.

Warm Brunette

Warm brunette mendukung tren "rich hair look", yaitu tampilan rambut sehat, mewah, dan tampak mahal. Warna ini didominasi pigmen hangat seperti caramel, amber, espresso, hingga chestnut.

Cocok untuk undertone warm dan neutral. Bisa mengurangi efek kusam karena pigmen keemasan membuat rambut tampak lebih glossy.

Ramah rambut rusak sebab pewarnaan brunette membutuhkan oksidasi rendah dibandingkan pirang sehingga lebih aman untuk tekstur rapuh.

Tingkat juga oksidasi aman. Tone cokelat dengan developer rendah (sekitar 10-20 volume) menjaga kutikula tidak terlalu terbuka. Warm brunette cocok bagi mereka yang ingin tampilan elegan, natural, dan mudah dirawat tanpa bleaching berlebihan.

Butter Blonde & Golden Naturals

Butter blonde dikenal sebagai pirang lembut dengan aksen keemasan yang meniru efek "sun-kissed". Shade ini sempat menjadi tren besar di 2025 dan bertahan berkat hasil yang natural namun tetap glam.

Cocok untuk warna kulit warm & neutral undertone. Pigmen utamanya yellow-gold yang dapat menetralkan efek pucat pada kulit. Sehingga menghasilkan efek visual yang membuat garis rahang dan tulang pipi tampak lebih tegas karena memantulkan cahaya.

Perawatan memerlukan purple/blue shampoo untuk mencegah brassiness. Butter blonde juga memberi kesan youthful dan chic tanpa terlihat terlalu ekstrem.

Copper, Cinnamon, & Ginger

Warna ini memadukan pigmen merah, amber, dan gold sehingga menghasilkan spektrum hangat mulai dari tembaga menyala hingga jahe lembut.

Secara psikologi warna, shade merah keemasan diasosiasikan dengan energi, percaya diri, dan karakter kuat.

Pigmen FeO (iron oxide) dalam pewarna memberikan kilau kemerahan stabil. Cocok untuk kulit fair hingga medium, karena memberi kehangatan tanpa membuat wajah pucat.

Memberikan fade cantik karena warna ini memudar menjadi strawberry blonde natural, bukan kusam. Perawatannya memerlukan toning berkala karena pigmen merah adalah yang paling cepat memudar (molekulnya lebih kecil dan mudah terbilas). Ini warna sempurna bagi yang ingin tampil mencolok namun tetap elegan.

Futuristik Metalik

Tren visual era digital, AI art, dan holographic beauty membawa warna metalik ke popularitas baru. Shade seperti teal metalik, lavender silver, hingga fuchsia futuristik semakin mudah dipakai berkat formula pewarna yang kini lebih halus dan tahan lama.

Pigmen metalik menggunakan molekul mica atau pearlescent particles yang memantulkan cahaya dan menciptakan efek berkilau 3D. Cocok untuk semua undertone, tergantung shade yang dipilih. Hasil terbaik pada rambut yang dibleaching hingga level

9-10, karena warna metalik butuh dasar pirang pucat. Perawatan dibutuhkan intensif sebab memerlukan shampoo tanpa sulfat serta toning reguler. Warna ini cocok untuk mereka yang ingin tampil edgy, modern, dan mencerminkan semangat futuristik.

Bold & Kontras

2026 juga menandai semakin kuatnya tren warna sebagai media ekspresi diri. Burgundy pekat, deep blue, violet noir, hingga merah dramatis banyak dipilih untuk menyampaikan karakter, mood, dan keberanian personal. Pigmen direct dye memiliki molekul besar sehingga memberikan warna sangat intens. Teknik layer matte + glossy menciptakan permainan dimensi visual yang modern.

Cocok untuk kulit cool, neutral, dan sebagian warm undertone. Beberapa warna bisa diaplikasikan langsung pada rambut gelap, terutama burgundy dan deep red.

Dalam perawatannya memerlukan masker dan shampoo pewarna agar intensitas tidak cepat luntur. Shade ini adalah jawaban bagi mereka yang ingin tampil artistik, dramatis, namun tetap elegan. Tren warna rambut 2026 lebih dari sekadar perubahan penampilan, tapi mencerminkan perkembangan teknologi pewarnaan. (tin,ist/dya)



Benderang Perpecahan ...dari hal 1

Konflik di tubuh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) masih jauh dari kata damai. Terbaru dya kubu saling mengeluarkan jadwal rapat pleno. PBNU kepengurusan Yahya Cholil Staquf akan menggelar rapat pleno tandingan pada 11 Desember 2025. Rapat pleno yang dipimpin Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf atau yang akrab disapa Gus Yahya akan digelar setelah pleno Syuriah PBNU pada 9 Desember 2025. Rapat pleno kepengurusan Gus Yahya akan digelar di kantor pusat PBNU, Jakarta.

"Ketua umum akan menyelenggarakan rapat pleno sendiri pada 11 Desember di PBNU," kata Ketua PBNU Ulil Abshar Abdalla Minggu (7/12/2025).

Ulil mengatakan ada tiga agenda yang akan dibahas dalam pleno nanti, yakni evaluasi program, konsolidasi organisasi, dan penanggulangan bencana. Saat ditanya apakah pleno membahas perombakan organisasi, Ulil mengatakan belum ada rencana pembahasan perubahan struktur.

Sebelumnya, PBNU jajaran Syuriah akan menggelar rapat pleno untuk menetapkan penjabat ketua umum PBNU untuk menggantikan Gus Yahya yang telah dipecat pada Selasa, 9 Desember 2025. Rapat ini akan dihadiri oleh unsur kepengurusan PBNU, yaitu Mustasyar, A'wan, Syuriah, Tanfidziyah, serta seluruh pimpinan lembaga dan badan otonom PBNU.

Ketua PBNU Mohammad Mukri mengatakan rapat pleno merupakan forum konstitusional yang penting untuk memastikan kesinambungan kepemimpinan PBNU berjalan sesuai aturan organisasi.

Mukri menegaskan bahwa keputusan Syuriah PBNU untuk memberhentikan Yahya Cholil Staquf sebagai ketua umum PBNU adalah keputusan final dan mengikat. Rapat pleno mendatang menjadi bagian dari tindak lanjut mekanisme organisasi sesuai amanat Syuriah PBNU.

"Insyaa Allah. Salah satu agendanya adalah penetapan Pj Ketum PBNU," kata Mukri, dikutip dari keterangan tertulisnya.

Mukri memastikan seluruh proses akan ditempuh dengan menjunjung tinggi nilai keulamaan, kehati-hatian, serta tata tertib organisasi. Ia mengimbau seluruh warga NU untuk tetap tenang, menjaga ukhuwah, dan mengikuti informasi resmi yang dikeluarkan PBNU agar tidak terpengaruh spekulasi yang berkembang di ruang publik.

Rais Syuriah PBNU, Muhammad Nuh yang menghadiri forum kiai sepuh dan Mustasyar NU di Pondok Pesantren Tebuireng Jombang, Jawa Timur, Sabtu (6/12/2025) menegaskan agenda rapat pleno



Forum Sesepeuh & Mustasyar Nahdlatul Ulama bertemu di Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur, Sabtu (6/12/2025). (Dok. Istimedia)

terkait penetapan Penjabat (Pj) Ketua Umum PBNU tetap digelar. "Tanggal 9 Desember 2025 akan ditindaklanjuti melalui pleno dengan mengangkat pejabat yang baru. Undangan juga sudah beredar," kata M. Nuh.

M. Nuh melanjutkan, dirinya hadir dalam forum tersebut untuk mewakili Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar yang berhalangan hadir. Dalam forum itu, dia menyampaikan soal polemik internal di tubuh PBNU.

Selain itu, M. Nuh juga menyatakan bahwa keputusan rapat Syuriah pada 20 November 2025 yang memberhentikan Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf bersifat final. Sebab, kata dia, Syuriah berada dalam posisi teratas dalam struktural

PBNU.

"Keputusan itu sudah selesai dan bersifat final. Rais Aam pun sudah menyampaikan secara terbuka," ucap eks Rektor Institut Teknologi Sepuluh November itu.

M. Nuh juga menanggapi soal kemungkinan perubahan sikap Syuriah usai pertemuan ini. Dia menegaskan tidak akan ada perubahan sikap, termasuk soal rapat pleno yang sempat disarankan untuk ditunda. "Tidak ada. Sampai saat ini posisi Syuriah adalah posisi supremasi (paling atas dalam struktural) dan keputusannya sudah final," tegasnya.

Dia juga menegaskan bahwa forum kiai sepuh dan Mustasyar PBNU ini

bukan islah. Kendati demikian, pihaknya terbuka untuk dialog demi kebaikan organisasi. "Peluang (dialog) itu tidak tertutup. Tapi ini bukan islah karena tidak ada gegaran. Ini konteksnya pemberian sanksi. Saran tetap kami terima, tetapi keputusan harus melalui mekanisme organisasi," paparnya.

Sementara, Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Said Aqil Siroj, mengusulkan agar konsesi tambang yang diberikan pada PBNU sebaiknya dikembalikan kepada pemerintah.

Ia menyampaikan usulan itu saat menghadiri silaturahmi di Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur, pada Sabtu (6/12/2025).

Mengutip keterangan tertulis di laman NU, usulan itu muncul setelah melalui evaluasi yang jernih terhadap persoalan tersebut.

Alasan usulan pengembalian konsesi tambang kepada pemerintah adalah demi menghindari mudarat yang semakin nyata.

Awalnya, Said menilai kebijakan pemberian konsesi tambang tersebut sebagai bentuk apresiasi negara terhadap kontribusi NU dan sebagai peluang untuk memperkuat kemandirian ekonomi organisasi.

Pada saat itu, langkah tersebut dianggap tepat, selama dikelola dengan tata kelola yang kuat serta membawa manfaat nyata bagi warga NU. (wid, ant, ist, kum, dya)

Ponpes Tempat Gus Yahya Mondok Dukung Ketum PBNU Diganti

PONDOK Pesantren (Ponpes) Ali Maksum Krapyak, Yogyakarta, tempat KH Yahya Cholil Staquf pernah mondok mengeluarkan surat pernyataan resmi yang menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Rapat Pleno PBNU pada 9-10 Desember 2025. Adapun Rapat Pleno PBNU bakal membahas sejumlah agenda, salah satunya pergantian Ketua Umum PBNU.

Dalam surat itu, Pimpinan Pengasuh Pondok Pesantren Ali Maksum Krapyak Yogyakarta KH. Khoirul Fuad Ahmad mengatakan bahwa PBNU sebagai pimpinan tertinggi Jam'iyah tidak boleh dijadikan korban kepentingan apa pun dan harus dijaga agar tetap tegak dan terarah. Selain itu pimpinan harus serta terhindar dari mudharat yang lebih besar bagi organisasi maupun warga Nahdliyin.

Pesantren Krapyak juga menyebut adanya polemik internal terkait pengambilan keputusan oleh KH Yahya Cholil Staquf yang dinilai perlu diklarifikasi melalui mekanisme Jam'iyah secara menyeluruh.

Karena itu, mereka menilai

bahwa Pleno PBNU menjadi ruang yang sah, konstitusional, dan diperlukan untuk menjaga stabilitas organisasi. Hal itu termasuk jika harus mengambil keputusan strategis terkait pergantian Ketua Umum.

"Kami memberikan dukungan penuh atas Pleno PBNU tanggal 09-10 Desember 2025 dalam mengambil langkah bagi kebaikan semuanya," kata KH. Khoirul Fuad Ahmad dalam keterangan tertulis, Minggu (7/12/2025).

Sikap ini menjadi perhatian publik karena Gus Yahya adalah salah satu alumni Pondok Pesantren Ali Maksum Krapyak. Meski demikian, pesantren menegaskan bahwa dukungan diberikan demi kemaslahatan Jam'iyah, bukan atas dasar hubungan personal.

"Pesantren Krapyak juga menghimbau semua pihak agar menghormati nasehat para sesepeuh dan mematuhi keputusan Jam'iyah, demi keutuhan Nahdlatul Ulama dan keteduhan umat menjelang Muktamar NU 2026," tutupnya.

Sebagai informasi tambahan, surat pernyataan resmi dari Pesantren Krapyak sendiri

ditandatangani langsung oleh Pimpinan Yayasan/Pengasuh Pondok Pesantren Ali Maksum Krapyak Yogyakarta, KH. Khoirul Fuad Ahmad.

Terpisah, Mustasyar PBNU, Tuan Guru Haji (TGH) Muhammad Turmudzi Badaruddin, menyampaikan pernyataan resmi yang menegaskan dukungannya terhadap jajaran Syuriah PBNU, pasca keputusan pemberhentian Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya).

Dalam sebuah video berdurasi dua menit tujuh detik, yang dibagikan secara resmi, TGH Turmudzi menegaskan bahwa Syuriah, terutama Rais Aam merupakan pimpinan tertinggi dalam struktur organisasi Nahdlatul Ulama. Karena itu, keputusan Rais Aam wajib dihormati oleh seluruh pengurus PBNU.

"Kepada seluruh para alim ulama, habaib, pemuka agama, masyarakat Nahdliyyin dan masyarakat Indonesia, saya atas nama H. M. Turmudzi Badaruddin mendukung putusan Rais 'Aam. Karena Rais 'Aam adalah yang tertinggi dalam organisasi," kata TGH Turmudzi dalam pernyataannya. (ant, ist, dya)

NASIB UMP MASIH MENGGANTUNG

Airlangga Sebut Regulasi Siap, Buruh Dengar Nilai di Bawah 2025

Kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 masih menggantung alias belum diumumkan hingga saat ini. Padahal sesuai ketentuan, pengumuman seharusnya dilakukan pada 21 November 2025. Namun, pemerintah menegaskan jika hal itu akan dilakukan paling lambat 31 Desember 2025. Alasan pemerintah karena masih menyusun aturan baru terkait mekanisme penetapan upah minimum. Kabar terbaru yang beredar, nilai kenaikan tahun depan lebih rendah dibanding 2025.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengakui, pembahasan upah minimum provinsi (UMP) 2026 sudah rampung. Beredar informasi, pekan depan (pekan ini, red) diumumkan.

"Regulasi (UMP 2026) sudah diparaf (ditandatangani)," kata Menko Airlangga di Jakarta, dikutip Minggu (7/12/2025). Sayangnya, mantan Ketua Umum (Ketum) partai Golkar ini, tak menyebut kapan aturan itu diumumkan.

Sebelumnya, Menteri



(Ilustrasi) Buruh menggelar aksi unjuk rasa soal kasus gagal ginjal akut di depan Kantor Kemenkes, Jumat (28/10/2022). (ist.kcm)

Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan, formula perhitungan UMP 2026 ditetapkan dengan regulasi yang sudah ada, yakni PP Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Dia mengatakan akan ada penyesuaian nilai alpha atau indeks tertentu yang menggambarkan kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebelumnya, nilai alpha ditetapkan dalam rentang 0,10 sampai dengan 0,30.

BERAPA RERATA UMP DARI 2020-2025?

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS)

- 2020: Rata-rata UMP Rp2.672.371,36 di tengah tekanan ekonomi pandemi.
- 2021: Naik tipis menjadi Rp2.687.723,69 akibat dampak pandemi yang masih terasa.
- 2022: Meningkat ke Rp2.729.436,16 sesuai aturan PP 36/2021 tentang Pengupahan.
- 2023: Naik signifikan ke Rp2.923.309,40 atau sekitar 7,5 persen.
- 2024: Tembus Rp3.113.359,85 dengan 38 provinsi menetapkan UMP.
- 2025: Naik 6,5 persen menjadi Rp3.315.727 atau bertambah sekitar Rp202.368.

RUMUS perhitungan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang belum dikeluarkan pemerintah pusat, membuat UMP Sulawesi Selatan (Sulsel) juga belum ditetapkan.

Pengamat Ekonomi Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar, Dr Sutardjo Tui, menyoroti persoalan tiap tahun yang terjadi dalam penentuan UMP.

Ia menilai, penetapan UMP tidak bisa dilihat dari satu sisi saja.

Sebab, melibatkan tarik-menarik kepentingan antara pekerja dan pengusaha.

Di satu sisi, buruh menginginkan UMP naik tinggi agar daya beli dan kesejahteraan meningkat.

Di sisi lain, pengusaha

Pengamat Ekonomi: Tidak Bisa Dilihat dari Satu Sisi

cenderung menginginkan UMP rendah agar beban biaya operasional tetap terkendali.

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Unismuh Makassar ini menekankan, acuan pokok dalam penyesuaian UMP seharusnya adalah tingkat inflasi di suatu daerah.

Sebab, UMP pada dasarnya untuk menjaga kemampuan pekerja menikmati gaji seiring kenaikan harga barang dan jasa.

"Sebenarnya acuan pokoknya UMP itu adalah tingkat inflasi dalam satu daerah. Paling tinggi ya pertumbuhan ekonominya, tapi yang normal itu inflasi," kata Sutardjo, dikutip Minggu (7/12/2025).

Sutardjo mencontohkan, jika inflasi hanya sekitar 3 persen, maka tuntutan kenaikan upah yang jauh melampaui angka itu dinilai tidak realistis.

Menurutnya, tuntutan yang terlalu tinggi berisiko memukul dunia usaha.

"Kalau inflasi cuma 3 persen,

jangan sampai minta 5. Pertumbuhan kan cuma 5 juga, jangan minta 10 persen," sebutnya.

Sutardjo mengingatkan, kenaikan upah yang terlalu tinggi dapat memunculkan efek lanjutan. Mulai dari investor pindah ke daerah lain hingga melemahnya minat investasi di wilayah tersebut. Kondisi itu, kata dia, justru dapat berbalik merugikan buruh.

Namun, ia juga menilai upah yang terlalu rendah tetap tidak adil karena membuat pekerja kesulitan memenuhi kebutuhan dasar.

"Kalau terlalu rendah juga kasihan buruhnya, tidak bisa makan," katanya.

Karena itu, Sutardjo menilai fungsi pemerintah bukan sekadar menetapkan angka.

Tetapi menemukan kepentingan buruh dan pengusaha, memberi penjelasan kepada kedua pihak, lalu menetapkan titik tengah agar tidak merugikan salah satu pihak. (wid,tri,uat/dya)

Penggunaan kembali formula upah menjadi pembeda antara kenaikan UMP 2026 dengan UMP 2025 yang naik 6,5%. Dengan menggunakan formula tersebut, maka ke depannya kenaikan UMP di setiap provinsi akan berbeda.

"Formula sudah jelas ya, formula itu kan kita mengacu kepada sudah ada regulasinya, tinggal nanti range-nya terkait dengan alpha berapa. Ini yang masih menunggu finalisasi," ujar Yassierli di Jakarta, Jumat (28/11/2025).

Sedangkan, Ketua Umum KSPSI, Andi Gani Nena Wea merasa pesimi kenaikan UMP 2026 lebih tinggi atau minimal setara dengan kenaikan UMP 2025 yang mencapai 6,5 persen.

Dari komunikasi itu, Andi Gani mendapatkan informasi bahwa kenaikan UMP 2026 lebih rendah ketimbang UMP 2025 yang naik 6,5 persen.

"Bocoran 2 hari dari sumber yang sangat terpercaya, memang kalkulasi upahnya menurun. Tetapi kan ini belum pasti, sumbernya dari mana kalkulasi angka ini? Dari ada pertumbuhan ekonomi ditambah A (alfa) dan lain-lain," jelasnya.

Kendati demikian, sumber informasi tersebut juga belum memastikan keputusan dari pemerintah. Apalagi, hingga saat ini, pemerintah belum mengeluarkan formula UMP 2026.

Dia menilai hal itu dapat memicu kegelisahan di kalangan pekerja. "Nanti saya agak khawatir nih, tiba-tiba akhir tahun baru diumumkan, buruhnya kaget. Nah, itu yang harus kita hindari karena sampai hari ini, kami tanya, kami punya anggota Dewan Pengupahan Nasional di tingkat nasional sampai tingkat daerah, formulanya tertutup," tegasnya.

Andi Gani menyoroti ketidakjelasan formula yang digunakan pemerintah dalam menghitung UMP 2026. Berbagai simulasi yang beredar di kalangan serikat pekerja belum dapat dipastikan kebenarannya, terutama karena pemerintah tiba-tiba menggunakan pendekatan perhitungan dari International Labour Organization (ILO) yang sebelumnya tidak pernah dipakai Indonesia.

Ia menjelaskan bahwa pendekatan ILO umumnya diterapkan oleh negara-negara dengan pertumbuhan ekonomi yang sudah sangat maju. "Perhitungan ILO itu biasa digunakan oleh negara yang pertumbuhan ekonominya sudah sangat maju," kata dia.

Dunia usaha dan serikat pekerja masih menunggu payung hukum untuk menghitung kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026. Pasalnya, regulasi anyar, Dewan Pengupahan Nasional belum bisa memulai sidang penetapan upah. (wid,krn,ist/dya)